

perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah ini lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan proporsi pada laki-laki tercatat lebih rendah, yakni sebesar 9,40%.(Wibisana, 2023). Perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dan sering kali menjadi indikator kesejahteraan yang lebih rendah dalam keluarga miskin. feminisasi kemiskinan menjadi fenomena yang kompleks, di mana perempuan mengalami dampak dari kemiskinan jauh lebih berat dibandingkan laki-laki (Musdawati, 2024).

Pemerintah Indonesia terus mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui sejumlah kebijakan, salah satunya melalui instruksi presiden tahun 2020 yang mengatur tentang integrasi gender dalam pembangunan nasional. Millenium Development Goals (MDGs) dan tujuan pembangunan manusia di Indonesia yaitu pentingnya mendorong kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan menjadi landasan utama dalam meningkatkan kapasitas dan mutu sumber daya manusia (U. E. Pertiwi et al., 2021). Selama dua puluh tahun terakhir, tingkat keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang berarti dan tetap berada di sekitar angka 50% jauh tertinggal dari laki-laki yang stabil pada kisaran 80% (Kemenpppa.go.id, 2024). Perempuan cenderung mendominasi sektor pekerjaan informal karena fleksibilitas jam kerja yang memudahkan mereka menyeimbangkan peran domestik dan pekerjaan. Sektor ini menarik karena tidak memerlukan keterampilan formal atau struktur kerja yang kaku, sehingga lebih mudah diakses (Astutiningsih et al., 2024).

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau adalah tingginya angka kemiskinan, yang turut diperburuk oleh masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas pasar kerja formal., Kabupaten Bintan terdapat beragam potensi yang dapat dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pariwisata dan perikanan. Memiliki program kerja pembangunan ekonomi pada bidang maritim dengan memanfaatkan wilayah yang di didominasi oleh sumber daya laut (Rusfiana, 2022). Menurut data terkini dari BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan di kabupaten Bintan pada tahun 2024 mencapai 5,4% menurun dari 5,9 % dari 2023 menurun dari 6,42% pada tahun 2021 dan 6,44% pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat, meskipun angka tersebut masih menunjukkan bahwa sejumlah penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2024 mencapai 8,89%, meningkat signifikan dari 6,14% pada tahun 2023. Angka ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan melampaui target nasional. Ekonomi Bintan didominasi oleh sektor industri pengolahan (40,25%), diikuti konstruksi (21,92%), perdagangan besar dan eceran (9,96%), Kontribusi ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 7,10%, diikuti oleh sektor akomodasi dan konsumsi makanan dan minuman sebesar 5,85%. Industri pengolahan telah menjadi penopang utama ekonomi selama lima tahun terakhir, didukung pengembangan kawasan industri seperti

Bintan Industrial Estate dan KEK Galang Batang. IPM Bintan terus meningkat dari 76,04 (2020) menjadi 77,96 (2024), dengan status IPM “tinggi” dan pertumbuhan rata-rata 0,63% per tahun. Tahun 2024, IPM Bintan melampaui rata-rata nasional dan menurunnya Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,43% (2023) menjadi 4,53% (2024).

Tabel 1. 1 Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Kabupaten Bintan

Wilayah	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin (Persen)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kepulauan Riau	83.93	86.44	84.92	51.92	50.68	51.95
Karimun	79.27	78.96	84.30	41.76	41.28	44.26
Bintan	82.32	84.03	85.06	42.75	46.87	48.86
Natuna	86.13	82.81	82.69	57.45	51.88	61.42
Lingga	83.44	80.97	83.22	44.85	48.70	55.98
Kepulauan Anambas	83.73	84.30	85.73	55.72	57.93	53.67
Batam	86.09	89.62	86.37	55.37	52.04	52.65
Tanjung Pinang	74.63	77.56	79.41	46.26	52.98	53.48

Sumber Data : BPS Provinsi Kepri, 2024

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan tingkat bahwa Kabupaten Bintan masih menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan dan partisipasi perempuan dalam partisipasi angkatan kerja (TPAK). Meskipun mengalami peningkatan, namun diangka yang hanya berkisar di sekitar angka 50 % dan jauh tertinggal dibanding laki-laki. Begitu juga, Data Sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Bintan hanya berada diangka 24,06 %. Ini mencerminkan rendahnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga dan ekonomi secara keseluruhan, serta menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi.

Tabel 1. 2 IDG-Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kepri

Wilayah	IDG-Sumbangan Pendapatan Perempuan(Persen)	
	2022	2023
Kepulauan Riau	28.64	28.01
Karimun	25.15	24.77
Bintan	24.09	24.06
Natuna	24.4	24.44
Lingga	22.08	22.83
Kepulauan Anambas	26.11	25.67
Batam	29.63	29.02
Tanjung Pinang	26.97	27.12

Sumber data : BPS Prov.Kepri, 2024

Pada tahun 2023, kontribusi pendapatan kerja perempuan di Kabupaten Bintan tercatat sebesar 24,09%. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 28,37% dan juga di bawah rata-rata nasional sebesar 36,70%. Secara regional, Kabupaten Bintan menempati urutan terendah kedua setelah Kabupaten Lingga. Banyak perempuan di Kabupaten Bintan hanya menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik atau berwirausaha terbatas. Sebagian besar bekerja di sektor informal sebagai pedagang kecil dengan pendapatan yang tidak stabil. Berdasarkan penelitian (Pepriyana et al., 2024), mayoritas penduduk Bintan sebagian besar adalah nelayan masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pengusaha atau pengepul, yang menyebabkan hasil tangkapan tidak selalu mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidakpastian hasil tangkapan akibat kondisi cuaca dan laut yang tidak menentu membuat pendapatan nelayan tidak stabil, sehingga perempuan berperan aktif membantu

perekonomian keluarga melalui aktivitas jual-beli, menjadi penggerak ekonomi keluarga bukan hanya pendukung semata.

Tabel 1. 3 Penduduk Miskin Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	2021	2024	Hasil
1.	Teluk Bintan	3911	3490	- 421
2.	Bintan Utara	7253	6273	- 980
3.	Teluk Sebong	6099	5178	- 981
4.	Seri Kuala Lobam	6239	5285	- 954
5.	Bintan Timur	12522	11768	- 754
6.	Gunung Kijang	5809	5788	- 21
7.	Mantang	2031	2230	+ 199
8.	Bintan Pesisir	3636	3084	- 552
9.	Toapaya	3932	4143	+211
10.	Tambelan	4191	3317	- 874

Sumber data : Portal Satu Data Kabupaten Bintan

Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bintan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Penurunan terbesar terjadi di Kecamatan Teluk Sebong, Bintan Utara, dan Seri Kuala Lobam. Meskipun demikian, tidak semua wilayah menunjukkan perbaikan. Kecamatan Mantang dan Toapaya justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, yang menunjukkan adanya ketimpangan kondisi sosial ekonomi antarwilayah. Sementara itu, Kecamatan Bintan Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dalam dua periode tersebut, meskipun angkanya mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama di wilayah tersebut dan membutuhkan perhatian lebih dalam upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan data tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bintan, tercatat sebanyak 4.080 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah tersebut, di mana sebagian besar merupakan Perempuan. Situasi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bintan memiliki semangat dan inisiatif tinggi dalam mengembangkan usaha secara mandiri, meskipun hanya mengandalkan modal terbatas yang tersedia (Dwi Cahyani, 2024). Tren pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa sektor ini tetap relevan sebagai sumber peluang usaha yang mampu menunjang ketahanan ekonomi masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjalankan berbagai program strategis untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain perbaikan infrastruktur dasar, bantuan sosial seperti JKN dan PKH, pemberdayaan pelaku UMKM serta sektor lokal, dan pelaksanaan program beasiswa bagi pelajar dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat perekonomian masyarakat adalah melalui pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disalurkan lewat mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, hal ini diatur dalam Peraturan No 25 tahun 2015. Peraturan Tersebut menyatakan KUBE merupakan kelompok miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang dengan karyanya dalam

mengembangkan aktivitas ekonomi yang produktif guna menunjang peningkatan kesejahteraan dan pendapatan rumah tangga. Tujuan dibentuknya agar masyarakat miskin bisa berdaya dalam hal Sosial dan ekonomi contohnya meningkatkan pendapatan, meningkatkan dan kapasitas Individu, Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, Program Kesejahteraan Sosial bertujuan meningkatkan kemandirian individu dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memperkuat solidaritas sosial, dalam kerangka penghapusan kemiskinan yang menitikberatkan pada aspek sosial dan ekonomi secara seimbang (Melinawati, 2020). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi produktif yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan kapasitas usaha mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas yang berdampak langsung pada perbaikan taraf hidup. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa bantuan stimulan guna memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Selain sebagai bentuk intervensi sosial, Kelompok Usaha Bersama berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bintan secara terstruktur sudah berlangsung 1 dekatde Merujuk pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui strategi pemberdayaan ekonomi, khususnya

bagi keluarga kurang mampu. Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan, pelaksanaan, pendampingan, dan pelaporan pelaksanaa Kelompok Usaha Bersama. Berdasarkan Peraturan tersebut, KUBE merupakan suatu himpunan keluarga dari kalangan fakir miskin yang terbentuk, tumbuh, dan berkembang atas inisiatif sendiri. Anggotanya saling berinteraksi dalam satu wilayah yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat hubungan sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan bersama, menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi, serta menjadi wadah pengembangan usaha secara kolektif. Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2014 ditegaskan bahwa KUBE merupakan himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk secara mandiri berdasarkan kesamaan lokasi dan tujuan, yang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha produktif . Melalui KUBE inilah program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dijalankan oleh pemerintah daerah, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, Kelompok Usaha Bersama menjadi wadah atau media yang dibentuk dari program bantuan usaha ekonomi produktif untuk menyalurkan bantuan dan memfasilitasi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dikelola dengan pendampingan dari tenaga profesional yang memiliki wawasan, keterampilan teknis, serta dedikasi tinggi dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Setiap kelompok KUBE terdiri dari 5 hingga 20 kepala keluarga yang berasal dari kalangan tidak mampu dan tercatat dalam basis data terpadu penanganan kemiskinan dan

kelompok rentan. Melalui KUBE, kepala keluarga (KK) miskin yang telah memiliki kegiatan usaha, akan mendapatkan suntikan dana dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota/kabupaten setempat. Dinas Sosial Kabupaten Bintan bertindak sebagai penyalur dan pengawas bantuan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama. Total seluruh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada berjumlah 300 Kelompok, yang aktif sampai saat ini yaitu 229 Kelompok sedangkan 71 kelompok tidak aktif dan di damping Oleh 17 Pendamping . Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bintan telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan modal untuk meningkatkan usaha mereka sebesar Rp 20.000.000 / kelompok. Bantuan modal ini hanya dapat di rasakan sekali dalam satu kelompok.

Tabel 1. 4 Data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Jumlah KUBE Aktif
1	Bintan Utara	26
2	Seri Kuala Lobam	30
3	Toapaya	9
4	Bintan Timur	50
5	Gunung Kijang	30
7	Teluk Sebong	30
8	Bintan Pesisir	11
9	Teluk Bintan	15
9	Mantang	10
9	Tambelan	18
Total		229 KUBE

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Bintan, 2025

Berdasarkan data di atas, dari total Kelompok Usaha yang aktif di kabupaten Bintan, Peneliti memfokuskan Lokasi penelitian pada KUBE Kecamatan Bintan Timur karena wilayah ini memiliki jumlah Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) aktif terbanyak di Kabupaten Bintan, yaitu sebanyak 50 kelompok dari total 229 KUBE aktif dari 300 kube yang ada. Angka ini menunjukkan bahwa Bintan Timur merupakan wilayah yang paling intensif dalam pelaksanaan program KUBE dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 1. 5 Anggota KUBE Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa/Kelurahan Kecamatan Bintan Timur	JUMLAH KUBE	Jumlah	
			Perempuan	Laki- laki
1.	Kijang Kota	22	150	19
2.	Sei Enam	2	20	-
3.	Sei Lekop	21	180	-
4.	Gunung Lengkuas	5	-	8
Total			350	27
			377 anggota	

Sumber : Olahan Peneliti,2025

Selain jumlah yang signifikan, mayoritas anggota KUBE di Kecamatan Bintan Timur adalah perempuan, dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong rentan. Meskipun secara formal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dikhususkan untuk perempuan, data lapangan menunjukkan bahwa 94,16% dari total anggota KUBE di Kecamatan Bintan Timur adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, perempuan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan KUBE. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana partisipasi perempuan dalam KUBE dapat mendorong peningkatan kemandirian ekonomi mereka. Dengan konsentrasi KUBE yang tinggi dan keterlibatan aktif perempuan, Bintan Timur memberikan potret yang kuat untuk melihat bagaimana intervensi program pemerintah seperti KUBE dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan serta

mengindikasikan peran penting perempuan dalam ekonomi lokal, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan modal kepada KUBE, yang mayoritas anggotanya merupakan pelaku UMKM. KUBE berfungsi sebagai wadah kolektif yang mendukung pengembangan UMKM melalui pemberian modal, pelatihan, dan akses pasar, sehingga mendorong kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan anggota dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tabel 1. 6 Jumlah Pelaku UMKM Di Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Teluk Bintan	321
2.	Toapaya	213
3.	Gunung Kijang	206
4.	Mantang	227
5.	Bintan Pesisir	237
6.	Bintan Timur	781
7.	Teluk Sebong	219
8.	Bintan Utara	829
9.	Seri Kuala Lobam	396
10.	Tambelan	651
Total		4080

Sumber : DKUPP Kabupaten Bintan, 2023

Menurut Data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan terdapat 4.383 pelaku UMKM pada akhir tahun 2024, yang terdaftar di Kabupaten Bintan (Ardiansyah, 2025). Kecamatan Bintan Timur dan Bintan Utara tercatat sebagai dua wilayah dengan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbanyak di Kabupaten Bintan. mengindikasikan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin di Bintan Timur (754 orang dalam tiga tahun) relatif lebih kecil dibandingkan Bintan Utara (980 orang dalam tiga

tahun), dan bahkan lebih kecil dibandingkan beberapa kecamatan lain dengan jumlah UMKM yang lebih sedikit. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan KUBE dan UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Bintan Timur. Dari sisi kuantitas, ada peningkatan dan ekspansi program di wilayah tersebut. Beragam jenis usaha telah dijalankan oleh kelompok-kelompok KUBE di Bintan Timur, mulai dari sektor perikanan, perdagangan kecil, kuliner rumahan, hingga kerajinan tangan, yang sebagian besar dikelola berdasarkan hasil potensi laut. Mayoritas usaha yang dijalankan oleh anggota Kelompok usaha bersama di Kecamatan Bintan Timur adalah Home Industri seperti produksi kerupuk Ikan tamban, aneka kue basah dan cemilan. Produk-produk yang dihasilkan oleh KUBE turut dipromosikan secara maksimal melalui pemanfaatan media sosial serta diperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan sejumlah gerai ternama, seperti swalayan, Pinang Paleo, Citra Sari, D'Sayur TPI, dan lainnya. Meskipun ada peningkatan, masih terdapat tantangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur.

Survei pra-penelitian mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), antara lain keterbatasan akses pasar, minimnya promosi, serta kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan konsumen. Selain itu, keterbatasan pelatihan dalam manajemen usaha, pemasaran, dan keterampilan teknis turut menghambat perkembangan usaha yang dijalankan. Penelitian (Rahmawati, 2020) menunjukkan bahwa KUBE Rempah Wangi di Kampung Lengkuas, Bintan Timur, meskipun dinilai cukup berhasil dalam aspek pembentukan dan pelaksanaan program, masih

menghadapi kendala signifikan seperti rendahnya inovasi produk dan terbatasnya pemanfaatan pembiayaan mikro. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan sebagai faktor yang mendorong peningkatan pendapatan, kemampuan manajerial, serta solidaritas kelompok. Sementara itu, studi (Amalia et al., 2024) menemukan bahwa pelaksanaan KUBE di Desa Sungai Lekop dinilai cukup efektif dalam aspek sosialisasi, ketepatan sasaran, dan monitoring. Namun, kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum secara kuantitatif menguji dampaknya terhadap kemandirian ekonomi perempuan.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah adanya kesenjangan antara eksistensi keberadaan KUBE dan keberhasilan hasil yang diharapkan. Meskipun secara kuantitas jumlah KUBE di Kabupaten Bintan tergolong tinggi—terutama di Kecamatan Bintan Timur yang memiliki jumlah KUBE aktif terbanyak—kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi perempuan belum terbukti secara jelas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja serta minimnya sumbangan mereka terhadap pendapatan rumah tangga, meskipun mayoritas anggota KUBE adalah perempuan. Fakta bahwa sebagian KUBE mengalami stagnasi atau bahkan tidak lagi aktif setelah menerima bantuan awal menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan semata tidak otomatis menghasilkan pemberdayaan yang berkelanjutan, hal ini dilihat dari Adanya Kube yang tidak Aktif di lapangan.

Sebagian besar studi terdahulu lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan efektivitas program secara umum, tanpa menelaah secara mendalam

bagaimana kelembagaan KUBE itu sendiri—dengan prinsip-prinsip pelaksanaannya—berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi perempuan, terutama dalam konteks wilayah berbasis potensi sumber daya laut seperti Bintan Timur. Masih minimnya kajian kuantitatif yang mengukur hubungan antara keberadaan KUBE dan kemandirian ekonomi perempuan membuka ruang penelitian yang penting dan relevan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendekatan kuantitatif untuk menganalisis sejauh mana keberadaan kelembagaan KUBE mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi perempuan di Kecamatan Bintan Timur, baik dalam hal pendapatan, pengelolaan usaha, maupun peran dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Berdasarkan Pemaparan tersebut Maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kelompok Usaha Bersama terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka fokus perumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap tingkat kemandirian ekonomi perempuan di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan?
2. Sejauh mana kontribusi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memengaruhi kemandirian ekonomi perempuan di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap tingkat kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh perempuan di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai dampak Program Kelompok Usaha Bersama terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- b) Temuan penelitian dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi sebagai bagi para peneliti-peneliti yang mengkaji topik serupa di masa depan.

1.4.2. Secara Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah atau Lembaga Terkait dan Pelaksana Program Kelompok Usaha Bersama khususnya di Kabupaten Bintan.
- b) Memperluas wawasan Penulis tentang Bagaimana Pengaruh pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok usaha Bersama Terhadap kemandirian Ekonomi Perempuan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Indikator	Metode Penelitian	Hasil
Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE)Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga(Oktaviani, 2022)	Pemberdayaan Kinverter(1979). Penyusunan kelompok Pembangunan kelompok pemilihan fasilitator pengaktifan kelompok penyelenggaraan pertemuan pendukungan aktifitas pengembangan hubungan lokakarya	Kualitatif	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Program KUBE berperan efektif dalam mendukung pemberdayaan perempuan serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dalam keluarga. Meski demikian, masih diperlukan perhatian terhadap berbagai hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan motivasi dan keterampilan anggota kelompok agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal.
Persamaan : Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Perbedaan : Penelitian ini mengulas pemberdayaan Perempuan melalui kelompok usaha bersama KUBE) serta dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial Keluarga di dusun sorotagen, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengukur dampak Program yang sama terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Sorogaten, sedangkan subjek penelitian yang akan peneliti lakukan fokus terhadap perempuan di daerah Kabupaten Bintan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode Penelitian Kuantitatif . Hasil penelitian ini menunjukkan dampak positif KUBE terhadap kesejahteraan sosial keluarga.			
Pengaruh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Kemampuan Berwirausaha Keluarga Sangat Miskin Di Kabupaten Wonogiri (Melinawati, 2020)	Indikator Kelompok Usaha Bersama Manfaat Kelompok Usaha Bersama (Sosial) Kemampuan Modal (Ekonomi) Kualitas Kelembagaan Strategi Kemitraan	Kuantitatif	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan kewirausahaan di kalangan keluarga sangat miskin di Kabupaten Wonogiri. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui desain survei potong lintang (cross-sectional), dan analisis data menggunakan teknik regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program KUBE mampu memperkuat kapasitas kewirausahaan pada keluarga yang menjadi penerima manfaat program.
Persamaan : Bertujuan mengidentifikasi bagaimana Kontribusi program Kelompok Usaha Bersama terhadap Masyarakat			